

TRANSFORMASI PERAN AKTOR INTERMEDIARY DALAM AKTIVISME DIGITAL : STUDI KASUS FERRY IRWANDI DALAM DEMONSTRASI AGUSTUS 2025

Hibatulloh Akbar Novianto^a, Denddy Frianto^b, Hilmi Ash Shidiqi^c

^{a b c} Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: hibatullohakbarnovianto2000@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Ferry Irwandi sebagai aktor *intermediary* digital dalam aksi demonstrasi melalui platform media sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran fungsi intermediasi politik dari institusi formal menuju aktor digital non-partisan yang memperoleh legitimasi melalui proses komunikatif horizontal di ruang digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan pendekatan netnografi. Data primer berupa enam video *YouTube* dan 18 unggahan Instagram Ferry Irwandi beserta akun Malaka Project periode Agustus hingga September 2025, dianalisis menggunakan analisis tematik deduktif yang dipandu kerangka *connective action*. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan konsep aktor *intermediary* pada konten kreator digital non-partisan dalam konteks demonstrasi non-elektoral, sebuah dimensi yang selama ini luput dari kajian intermediasi politik yang umumnya berfokus pada entitas institusional dan konteks pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ferry Irwandi menjalankan fungsi *intermediary* digital melalui tiga dimensi yakni partisipasi berbasis preferensi personal, ekspresi politik melalui narasi personal, dan komunikasi jaringan yang terdesentralisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa aktor *intermediary* digital tidak menggantikan *intermediary* formal, melainkan beroperasi dalam relasi yang saling melengkapi sekaligus tegang, di mana tekanan wacana digital belum selalu terkonversi menjadi perubahan kebijakan institusional. Keterbatasan penelitian ini adalah fokusnya pada satu kasus tunggal sehingga generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji perbandingan lintas kasus pada aktor *intermediary* digital lain dalam konteks gerakan sosial di Indonesia guna memperkuat generalisasi temuan dan memperluas pemetaan fenomena intermediasi politik digital di tingkat nasional.

Kata Kunci: Aktor *Intermediary*, Demonstrasi, *Connective Action*, Aktivisme Digital

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Ferry Irwandi as a digital intermediary actor in demonstrations through social media platforms. This research is motivated by the shift in the function of political intermediation from formal institutions to non-partisan digital actors who gain legitimacy through horizontal communicative processes in the digital space. The study uses a qualitative method with a single case study design and a netnographic approach. Primary data in the form of six YouTube videos and 18 Instagram posts by Ferry Irwandi and his Malaka Project account from August to September 2025, were analyzed using deductive thematic analysis guided by the connective action framework. The novelty of this study lies in the application of the concept of intermediary actors to non-partisan digital creator content in the context of non-electoral demonstrations, a dimension that has been overlooked in studies of political intermediation that generally focus on institutional entities and the context of general elections. The results show that Ferry Irwandi carries out his digital intermediary function through three dimensions: participation based on personal preferences, political expression through personal narratives, and decentralized network communication. The study concludes that digital intermediary actors do not replace formal intermediaries, but rather operate in a complementary yet tense relationship, where the pressures of digital discourse have not always translated into institutional policy changes. A limitation of this study is its focus on a single case, requiring caution when generalizing. Future research is recommended to examine cross-case comparisons of other digital intermediary actors within the context of social movements in Indonesia to strengthen the generalizability of the findings and broaden the mapping of the phenomenon of digital political intermediation at the national level.

Keywords: Intermediary Actor, Demonstration, Connective Action, Digital Activism

* Corresponding Author.

E-mail: hibatullohakbarnovianto2000@mail.ugm.ac.id

PENDAHULUAN

Fungsi aktor intermediary selama ini dalam teori politik klasik hanya identik dengan institusi-institusi formal seperti partai politik, ataupun organisasi masyarakat sipil, di mana mereka berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan aspirasi rakyat (demos) kepada negara. Untuk menjalankan fungsi tersebut dan dapat dikatakan mewakili rakyat adalah ketika memperoleh mandat, kepercayaan dan legitimasi dari yang diwakili (Landwehr et al., 2022; Pitkin, 1967). Dalam kerangka representasi formal partai politik dipandang sebagai aktor utama yang menghubungkan rakyat dengan pengambil keputusan. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil seperti LSM dan serikat buruh juga menjalankan fungsi serupa melalui mekanisme advokasi, lobbying, dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik (Migdal, 2001; Onwuegbuchulam, 2021), dimana masyarakat sipil difungsikan sebagai ruang mediasi antara individu dan negara dalam kepentingan warga. Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai peran PKBI menunjukkan bahwa fungsi *intermediary* umumnya dijalankan oleh organisasi masyarakat yang memiliki struktur kelembagaan yang relatif jelas, dan bahwa organisasi masyarakat sipil tetap memainkan peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan negara dalam mobilisasi politik (Haryanto et al., 2013). Hal tersebut diperlukan karena demokrasi menyaratkan institusi dan aktor perantara yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan arena pengambilan keputusan politik, tanpa adanya mekanisme intermediasi yang efektif aspirasi sulit diterjemahkan menjadi agenda politik yang berpengaruh dalam proses kebijakan (Törnquist, 2017). Dengan demikian, fungsi intermediasi dalam teori politik klasik bersifat institusional, hierarkis, dan terstruktur, di mana proses komunikasi politik berlangsung secara vertikal dari masyarakat ke negara melalui lembaga-lembaga resmi yang memiliki legitimasi hukum dan struktur organisasi yang jelas.

Namun dalam dua dekade terakhir, perkembangan komunikasi politik digital menunjukkan adanya transformasi ruang partisipasi yang memungkinkan individu terlibat dalam diskursus politis tanpa perlu bergabung dalam saluran representasi konvensional (Dalimunthe, 2018). Jika pada masa lalu mobilisasi massa dalam gerakan sosial bergantung pada organisasi formal seperti partai politik, serikat buruh, atau kelompok mahasiswa yang terstruktur, maka kini mobilisasi dapat terjadi melalui jaringan digital yang cair dan terdesentralisasi. Dalam dunia digital, kekuatan tidak lagi terletak pada kontrol atas sumber daya fisik, melainkan pada pengendalian dan memanfaatkan jaringan informasi, komunikasi, dan hubungan sosial (Castells, 2013). Media sosial telah menjadi ruang baru bagi ekspresi politik, advokasi isu, hingga koordinasi aksi kolektif, yang tidak lagi mengandalkan kepemimpinan tunggal, melainkan jaringan interaksi antar individu yang saling terhubung secara fleksibel (Yuliarti et al., 2020). Dalam kerangka *connective action*, gerakan sosial kini dapat berlangsung tanpa struktur organisasi yang ketat karena setiap individu bebas bergabung atau meninggalkan aksi berdasarkan preferensi dan nilai personalnya (Bennett & Segerberg, 2013). Dalam kerangka ini, teknologi tidak lagi sekadar menjadi instrumen, melainkan menjelma sebagai agen penyelenggara gerakan itu sendiri (Utomo & Irwansyah, 2023).

Kajian mengenai aktivisme digital di Indonesia menunjukkan pola perkembangan pada ruang digital yang relatif konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Eriyanto dengan pendekatan *Social Network Analysis* menunjukkan bahwa mobilisasi politik di media sosial dapat terjadi melalui penggunaan tanda pagar yang membentuk jaringan percakapan digital dan menyebar melalui berbagai cluster pengguna namun tidak selalu didominasi oleh sebuah aktor pusat tertentu (Eriyanto, 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyuningroem dkk mengenai gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw yang menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran aktif dalam memobilisasi gerakan melalui media sosial, dengan memproduksi tanda pagar dan memperluas percakapan digital yang berkorelasi dengan aksi pada ruang *offline* (Wahyuningroem et al., 2024). Dalam konteks yang lebih luas pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah dan Jabbar menunjukkan bahwa fungsi intermediary dalam politik kontemporer tidak lagi terbatas pada institusi formal elektoral saja melainkan juga hadir melalui kelompok yang memperoleh legitimasi melalui jalur non-elektoral (Rahmatullah & Jabbar, 2023).

Salah satu figur yang paling menonjol dalam dinamika tersebut adalah Ferry Irwandi, Ferry Irwandi dipilih sebagai kasus penelitian karena memiliki pengaruh digital yang signifikan dalam

diskursus politik publik serta keterlibatan langsung dalam mobilisasi isu politik melalui media sosial. Ia merupakan konten kreator yang dikenal aktif memproduksi konten analisis sosial dan politik di Indonesia. Ferry terjun ke *YouTube* sejak tahun 2010. Berlatar sebagai mantan birokrat di Kementerian keuangan, Ferry memiliki modal pengetahuan birokrasi dalam pembuatan kontennya (Khotimah, 2025). Ia juga menginisiasi proyek bernama Malaka Project pada 20 Oktober 2023 guna memberikan kemudahan akses pendidikan di Indonesia sehingga membentuk masyarakat baru yang cerdas, kritis, dan empatik (Amania, 2025).

Tabel 1. Data Platform Digital Ferry Irwandi

<i>Platform</i>	Jumlah Pengikut	Total Tayangan	Pertumbuhan pengikut Agustus-September 2025
<i>Youtube</i>	1,99 Juta <i>Subscriber</i>	163.996.202	130.000 <i>Subscriber</i> Baru
<i>Instagram</i>	3,22 Juta <i>Followers</i>	-	1.059007 <i>Followers</i> Baru

Sumber: *Youtube/@FerryIrwandi, Instagram/@Irwandiferry, dan Socialblade.com*

Dengan jumlah pengikut Ferry Irwandi melalui platform youtube sudah mencapai 1,99 juta subscriber, dan dengan jumlah pengikut di Instagram berjumlah 3,22 juta. Sepanjang Agustus hingga akhir September 2025, Ferry tampil sebagai figur sentral dalam pusaran demonstrasi dan perdebatan publik di Indonesia yang menuntut reformasi kebijakan pemerintahan dan transparansi kinerja DPR, serta dengan aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan institusi negara baik secara langsung di lapangan maupun melalui kanal digital, terutama terkait isu darurat militer dan pembatasan kebebasan sipil (Tim tvonenews.com, 2025).

Kemunculan figur semacam Ferry mencerminkan respons terhadap krisis intermediasi politik formal, di mana lembaga-lembaga perwakilan justru kehilangan kepercayaan publik sehingga mendorong munculnya aktor-aktor alternatif yang mengisi kekosongan tersebut (Törnquist, 2017). Dalam konteks ini Ferry menjelma sebagai *brokerage* yakni penghubung antara keresahan masyarakat dan tuntutan perubahan institusional (Diani, 2003; Tilly & Tarrow, 2021). Fenomena keterlibatan Ferry menunjukkan perubahan penting dalam lanskap gerakan sosial Indonesia, media sosial berfungsi bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena legitimasi politik baru. Legitimasi dalam konteks digital tidak hanya bersumber dari prosedur institusional formal, tetapi juga dapat terbentuk melalui legitimasi komunikatif yang muncul dari proses diskursus publik yang rasional, inklusif, dan deliberatif antar warga negara (Habermas, 1996). Dalam konteks ini, aktor non-elektoral seperti konten kreator justru sering kali dinilai lebih kredibel dibanding aktor politik formal oleh publiknya (Stafford et al., 2025).

Meskipun literatur mengenai gerakan sosial digital di Indonesia sudah mengalami perkembangan, masih terdapat beberapa celah yang belum terisi, seperti dalam studi yang dilakukan (Eriyanto, 2020) dan (Wahyuningroem et al., 2024) yang masih terfokus pada gerakan sosial berbasis tanda pagar dan jaringan yang terdesentralisasi, belum mengkaji mengenai aktor individu konten kreator secara spesifik sebagai aktor penghubung dalam ruang demonstrasi digital. Kajian mengenai *intermediary* seperti yang dilakukan oleh (Haryanto et al., 2013) dan (Rahmatullah & Jabbar, 2023) juga masih berfokus pada aktor organisasional, belum pada individu non-partisan yang memperoleh legitimasi melalui jalur komunikatif digital. Kerangka representasi (Pitkin, 1967) dan intermediasi dari (Törnquist, 2017) dengan fenomena konten kreator dalam gerakan sosial digital masih sangat terbatas dalam literatur yang ada.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam konteks kajian gerakan sosial digital dan intermediasi politik dengan memperluas cakupan konseptual mengenai fungsi *intermediary* dengan contoh kasus pada aktor digital non elektoral dalam konteks demonstrasi yang masih terbatas di mana sebelumnya kajian sejenis banyak berfokus pada institusi maupun organisasi. Berikutnya penelitian ini menawarkan kerangka analitis integratif antara teori representasi (Pitkin, 1967), intermediasi politik (Migdal, 2001; Törnquist, 2017), *connective action* (Bennett & Segerberg, 2013), dan legitimasi komunikatif (Habermas, 1996) dalam membaca peran aktor *intermediary* digital dalam konteks gerakan sosial Indonesia, sebuah pendekatan yang belum berkembang dan terbatas dalam kajian yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memosisikan Ferry Irwandi bukan

sekadar sebagai subjek penelitian, melainkan sebagai representasi dari fenomena yang lebih besar yakni transformasi fungsi intermediasi politik di era digital yang tidak lagi dapat dipahami semata melalui kerangka institusional konvensional. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Ferry Irwandi sebagai aktor *intermediary* digital dalam aksi demonstrasi melalui platform media sosial. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah: pertama, bagaimana Ferry Irwandi membangun posisinya sebagai aktor *intermediary* digital dalam arena gerakan sosial di Indonesia; dan kedua, bagaimana Ferry Irwandi merepresentasikan fungsi aktor *intermediary* dalam mengartikulasikan keresahan publik dan membangun konektivitas sosial-politik melalui platform media sosial dalam konteks Demonstrasi Agustus hingga September 2025?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*) yang menempatkan Ferry Irwandi sebagai unit analisis utama sepanjang kasus demonstrasi Agustus-September (Yin, 2018). Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam bagaimana seorang aktor digital menjalankan fungsi intermediasi dalam konteks demonstrasi yang spesifik dan bersifat kontemporer. Untuk mengamati praktik komunikasi di ruang digital secara sistematis, penelitian ini mengadopsi pendekatan netnografi (Kozinets, 2020) yang memungkinkan peneliti mengobservasi narasi dan interaksi di platform digital secara alamiah tanpa mengubah konteks yang sedang diteliti.

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa konten digital yang meliputi enam video *YouTube* dan 18 unggahan Instagram Ferry Irwandi beserta akun Malaka Project pada periode Agustus hingga September 2025, beserta komentar *audiens* yang merepresentasikan respons publik terhadap narasi yang disampaikan. Data sekunder berupa literatur akademik, pemberitaan media, dan dokumen pendukung yang relevan termasuk laporan Amnesty International (2025) terkait penangkapan demonstran.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, observasi digital terstruktur terhadap konten *YouTube* dan *Instagram* Ferry Irwandi beserta akun Malaka Project dengan mendokumentasikan jumlah penonton, *likes*, komentar, dan tanggal publikasi sebagai indikator engagement publik. Kedua, analisis komentar (*comment analysis*) terhadap komentar terpilih yang merepresentasikan respons dan persepsi audiens. Ketiga, penelusuran dokumen (*document review*) terhadap pemberitaan media dan referensi akademik yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik deduktif (*deductive thematic analysis*) (Braun & Clarke, 2006) yang dipandu oleh kerangka *connective action* dari (Bennett & Segerberg, 2013). Data dianalisis berdasarkan tiga dimensi analitis yakni *individualized participation*, *personal action frames*, dan *networked communication* sebagai kategori tematik yang telah ditetapkan secara teoretis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan familiarisasi data, pemberian kode (*coding*) sesuai kategori tematik, peninjauan dan pencocokan temuan, hingga penyusunan laporan analisis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari platform *YouTube*, *Instagram*, pemberitaan media, dan laporan lembaga independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ferry Irwandi dan Aktivisme Digital

Ferry Irwandi adalah konten kreator yang dikenal memproduksi konten edukatif dengan perspektif kritis terhadap isu politik, pendidikan, dan fenomena sosial. Ferry terjun ke *YouTube* sejak tahun 2010, dengan latar belakang sebagai pegawai negeri sipil di Bagian Humas Kementerian Keuangan selama satu dekade sebelum memutuskan mengundurkan diri pada tahun 2022 untuk fokus berkarier sebagai kreator digital (Khotimah, 2025). Pengalamannya bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan memberinya wawasan dari dalam sistem yang menjadi modal penting dalam konten-konten kritisnya. Transformasi kariernya dari aparatur negara menjadi kreator digital menandai pergeseran peran Ferry dari *insider* birokrasi menjadi aktor publik yang memanfaatkan media digital sebagai arena baru aktivisme sosial dan politik.

Melalui berbagai platform media sosial, Ferry membahas topik yang beragam mulai dari politik, pendidikan, etika digital, hingga filsafat yang dibingkai dalam narasi yang reflektif dan emosional. Selain sebagai kreator independen, Ferry juga menginisiasi Malaka Project yang diluncurkan pada 20 Oktober 2023 di Jakarta Theater, terinspirasi dari pemikiran Tan Malaka, sebagai upaya membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan empatik (Amania, 2025). Melalui platform tersebut Ferry dan rekan-rekannya secara konsisten menyuarakan opini terhadap isu sosial melalui sinier maupun konten monolog naratif.

Data dari *Social Blade* menunjukkan pada tanggal 6 Oktober 2025 bahwa Ferry memiliki 3,2 juta pengikut di Instagram dengan *engagement rate* 2,99% dan kanal *YouTube* pribadinya mencapai 1,99 juta *subscriber* dengan total tayangan 165 juta. Malaka Project memiliki 705.000 *subscriber YouTube* dengan *engagement rate* 6,14% dan penetrasi seluruh konten Ferry di seluruh platform mencapai 1,3 miliar tayangan dalam sebulan. Tingginya *engagement* yang diperoleh Ferry mencerminkan kemampuannya mengoptimalkan platform digital untuk menyebarkan narasi kritis secara strategis kepada *audiens* yang luas.

Jangkauan komunikasi Ferry semakin meluas ketika ia secara terbuka mengkritik fenomena anggota DPR yang berjoget dalam rapat paripurna di tengah isu kenaikan gaji dan tunjangan, yang ia baca sebagai cerminan budaya kekuasaan yang kehilangan kepekaan sosial (Sumargo, 2025). Selain itu, dalam platform media sosial pribadinya Ferry juga banyak mengangkat isu demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Dalam salah satu videonya yang berjudul "Penjelasan Lengkap Rangkaian Aksi Demo dan Solusi", Ferry menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengevaluasi diri — baik ucapan, tindakan, maupun kebijakan sebagai penyebab kemarahan publik, dan mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan yang nyata guna meredakan demonstrasi dan menghindari darurat militer (Irwandi, 2025).

Dari pola aktivisme Ferry tersebut, terlihat bahwa ia menjadikan teknologi digital sebagai arena mengorganisir, mengadvokasi, dan menekan perubahan sosial-politik. Ferry tidak sekadar hadir sebagai figur digital yang menyuarakan opini, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengartikulasikan kepentingan publik dan memediasi pesan antara masyarakat dan negara. Peran inilah yang menjadi fokus pembahasan pada bagian berikutnya.

B. Ferry Irwandi Sebagai Aktor *Intermediary* Dalam Aktivisme Digital

Demonstrasi Agustus 2025 yang terjadi di banyak kota di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa gerakan sosial di Indonesia perlahan telah mengalami pergeseran. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemegang otoritas politik, terkhusus para legislator dan lembaga perwakilan yang berdampak pada melemahnya partisipasi kolektif masyarakat sebagai pondasi penting dalam sistem demokrasi. Sejalan dengan hal tersebut gelombang Demonstrasi Agustus 2025 bukan sekedar reaksi sesaat, akan tetapi sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat serta adanya krisis kepercayaan terhadap pemegang otoritas politik.

Dalam kasus tersebut Ferry Irwandi sebagai seorang *influencer* yang memiliki jutaan pengikut, kemudian muncul sebagai jembatan atau *Brokerage* antara masyarakat, media digital dan ruang kebijakan publik (Diani, 2003; Tilly & Tarrow, 2021). Dalam Demonstrasi Agustus 2025 Ferry Irwandi tidak berperan sebagai inisiator langsung dalam aksi tersebut, akan tetapi berupaya mengartikulasikan keresahan masyarakat dalam ranah digital sebagai arena diskursif dan arena simbolik yang berfungsi strategis dalam pembentukan dan peredaran citra politik (Saksono, 2020). Arena yang tidak mengenal dimensi ruang dan waktu, yang memungkinkan masyarakat berdiskusi, membentuk opini, serta membuat kontra-naratif di luar jangkauan negara dan media, Ferry Irwandi tidak memposisikan dirinya sebagai pemimpin gerakan formal akan tetapi sebagai artikulator gagasan atau aktor *intermediary*.

Analisis terhadap dinamika gerakan sosial terbaru menunjukkan adanya pergeseran signifikan menuju logika *connective action* sebagaimana dirumuskan oleh Bennett dan Segerberg (2013), basis mobilisasi kini lebih mengandalkan personalisasi isu. Dalam ekosistem digital ini, individu tidak lagi sekadar menjadi pengikut organisasi formal yang kaku, melainkan menjadi kontributor aktif yang menyebarkan narasi melalui lensa pengalaman dan identitas pribadi mereka. Fenomena tersebut mendapatkan momentumnya di Indonesia melalui kehadiran Ferry Irwandi sebagai aktor

intermediary atau katalisator, yang secara lihai mampu menjembatani isu-isu sosio politik yang kompleks menjadi diskursus publik yang relevan dan mudah diakses oleh audiens luas.

1) Partisipasi berbasis preferensi personal (*individualized participation*)

Unsur *Individualized Participation* dalam *connective action* dimana partisipasi gerakan sosial yang terjadi pada demo Agustus 2025 yang kemudian turut dikatalisasi oleh Ferry Irwandi melalui konten-konten yang diproduksi olehnya, bersifat terbuka dan tidak mengharuskan terikat dengan organisasi formal, menjadi manifestasi dalam unsur tersebut seperti dalam konten youtubenya yang berjudul “Warung kopi dan Robohnya Rezim Tirani!” yang dirilis pada 22 Agustus 2025 dimana konten tersebut meraih 650 ribu tayangan dan lebih dari 2000 komentar yang menjadi gayung bersambut, direspons oleh masyarakat dan konten kreator lain sebagai wujud partisipasi personal yang sebagian besar berupa ekspresi kemarahan dan ajakan reflektif terhadap keadilan sosial seperti salah satu komentar yang muncul dari @sriajibagaskara6529 menyatakan, “beliau ini secara gak langsung mengajak kita berfikir kolektif untuk menggulingkan DPR.” akun lain juga menyuarakan hal demikian, seperti diungkapkan akun @wildanaril530:

“saya termasuk orang yang sedang menggerakkan teman teman saya untuk terbiasa berpikir kembali, berpikir menggunakan logika dan ilmiah. sehingga tidak hanya menggunakan opini tidak berdasar namun perkataannya dapat dipertanggungjawabkan. terutama saat sedang di kafe/ warkop, sembari menyeruput kopi saya memulai pembicaraan dengan ide dan gagasan untuk negara ini yang lebih baik. dan semua itu terinspirasi oleh bung Ferry”

Partisipasi tersebut terhubung karena adanya kesamaan kepedulian terkait isu ketimpangan sosial dan ekonomi antara elit dan masyarakat tanpa ada struktur komando dan membuat masyarakat secara sukarela membagikan ulang konten tersebut di media sosial pribadinya, sehingga memungkinkan jangkauan pengaruhnya menjadi lebih luas ketimbang melalui organisasi massa konvensional. Ferry sebagai *Intermediary Actor* menjadi kunci dan sebagai katalisator mobilisasi massa tanpa struktur formal dalam Demonstrasi Agustus 2025 karena berfungsi sebagai broker yang menghubungkan individu yang sebelumnya terfragmentasi dan tidak saling mengenal kedalam jaringan kesadaran kolektif.

2) Ekspresi politik melalui narasi personal (*Personal action frames*)

Personal action frames / Personalized Expression menjadi unsur berikutnya dalam *connective action* yang menjelaskan bahwa partisipasi politik bisa tumbuh melalui ekspresi identitas dan pengalaman personal yang dibingkai dengan komunikatif. Ferry irwandi kemudian menggunakan pendekatan naratif yang menyentuh emosi dan nilai personal melalui berbagai kanal media sosial seperti Video, Siniar ataupun unggahan lainnya untuk menyampaikan kritik sosial dan menerjemahkan isu-isu besar yang kompleks dan berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti dalam Demonstrasi Agustus 2025. Ferry Irwandi menyuarakan perihal tingginya tunjangan DPR RI dan meninggalnya pengemudi ojol almarhum Affan Kurniawan (Nugraha, 2025; Pratama, 2025).

Narasi yang dibangun Ferry tersebut meskipun bersifat personal kemudian beresonansi secara kolektif melalui gaya komunikasinya yang naratif, reflektif dan emosional dalam membingkai sebuah fenomena, tindakan tersebut kemudian berubah menjadi sebuah ekspresi diri dan pernyataan identitas yang menjadi basis kesadaran sosial masyarakat, bukan lagi sekedar transmisi informasi. Hal tersebut tercermin dalam Postingan pribadi ferry pada tanggal 28 Agustus 2025 yang memperlihatkan statement berikut :

“Jangan ada pembelaan lagi, jangan ada pembelotan lagi, adili secepatnya, jangan sampai sedikitpun ada kegagalan atau ruang pembelaan atau perlindungan. Sedikitpun jangan. Kalau sedikit saja ada hal-hal seperti ini, maka kalian akan tahu seberapa besar api akan menyala dan seberapa besar dampaknya, Kita semua melihat! KITA BENAR-BENAR MELIHAT! #ACAB”

Postingan pertama beliau yang membahas terkait kerusakan demo tersebut meraih impresi sebanyak 999 ribu likes, komentar sebanyak lebih dari 12,3 ribu dan dibagikan ulang sebanyak 210 ribu. Netizen pun mengungkapkan rasa kesedihan dan memunculkan rasa senasib

sepenanggungan. Pada postingan lain yakni malaka group selaku organisasi yang dipimpin oleh Ferry Irwandi juga memunculkan *statement* yang berisi :

“Affan Kurniawan, kawan kita sesama pekerja, sesama warga negara Indonesia, telah mati dibunuh polisi. Dia ditabrak kendaraan taktis yang melaku kencang. Menurut kabar yang beredar di jejaring warga, ada empat korban lain yang ditabrak polisi hari ini, termasuk Moh. Umar Amarudin. Penabrak Umar terekam jelas dan beredar sangat luas di media sosial. Nyawanya selamat, namun ia masih terbaring di rumah sakit. Kami mengecam keras pembunuhan (dan percobaan pembunuhan) brutal ini dan menuntut Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jangan lagi ada pembohongan. Jangan lagi ada penundaan, Jangan lagi ada omong kosong apa pun demi nama baik institusi. Adili para pembunuh warga sipil sekarang juga, mulai dari para eksekutor hingga para komandan yang memberi mereka pemerintah!”

Postingan tersebut meraih lebih dari 2,3 Juta *likes* dan 18,4 ribu komentar yang berisi empati dan rasa memiliki dari narasi tersebut terbukti dari komentar salah satu akun yakni @ccnissaa yang menyatakan :

“21 tahun, dan dalam hembusan nafas terakhirnya, ia memakai jacket ojol.bayangin, kalau dia juga sedang berjuang untuk memerangi ekonomi yang ia hadapi. Tapi dia mati dibunuh, ditindas, dan dilindas, saat ini sedang menyuarakan keadilan untuk masyarakat supaya hidupnya lebih sejahtera. Ya Allah, berikan tempat terindah dan terbaik-Mu untuknya. Semoga husnul Khatimah”

Komentar tersebut juga meraih lebih dari 20 ribu *likes* dan 90 lebih komentar balasan yang membuktikan ekspresi personal tersebut kemudian menciptakan *emotional framing* yang membuat Ferry Irwandi sebagai perwujudan aktor *intermediary* memperoleh legitimasi komunikatif dari kepercayaan publik. Ia tidak memerintah akan tetapi membangun “rasa keterikatan bersama” yang muncul karena narasi dan nilai yang ia wakili yang kemudian membangun hubungan emosional dan rasa empati yang menyatukan publik dalam kesadaran kolektif baru.

3) Jaringan komunikasi yang menyebar (Networked communication)

Terakhir adalah unsur *Networked Communication* yang menjadi fondasi dari seluruh proses mobilisasi gerakan, melalui jejaring yang ada, informasi, narasi, serta seruan aksi tidak lagi melalui hierarkis *top-down* akan tetapi mengalir secara organik kepada tiap individu dalam sebuah jaringan yang luas dan terdesentralisasi. Ferry Irwandi melalui berbagai kanal media sosial yang dia miliki seperti Youtube, Instagram, dan Tiktok yang berfungsi sebagai media komunikasi dua arah, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima akan tetapi juga dapat turut berpartisipasi menyebarkan, menafsirkan serta memperkuat pesan yang disampaikan kemudian membentuk ruang-ruang diskursus baru yang kemudian menciptakan mobilisasi massa melalui keterbukaan, desentralisasi dan kolaborasi lintas jaringan. Hal tersebut juga sejalan dengan konsep aktivisme digital yang mana pemanfaatan teknologi dalam mendorong berbagai aktivitas masyarakat sipil terutama dalam konteks negara demokrasi (Rahmawan et al., 2020).

Dalam konteks Demonstrasi Agustus 2025, Ferry menyerukan melalui instagramnya tentang narasi anti-provokasi karena pembacaan adanya potensi darurat militer :

“Temen-temen hari ini kondusi semakin tidak kondusif. Mereka terus memprovokasi kita untuk turun ke jalan agar tujuan mereka atas darurat sipil dan militer tercapai. Jangan mau menuruti apa yang mereka mau, mari berstrategi, gunakan otak dan teknologi kita, sesuatu yang mereka gak punya. Presiden, DPR, Kepolisian harus bertanggung jawab segera!”

Seruan anti-provokasi Ferry bekerja sebagai *Networked Communication* karena pesan itu menyebar melalui simpul-simpul akun, bukan lewat komando terpusat. Dan menata perilaku kolektif dengan membakukan norma partisipasi: jangan terpancing, utamakan keselamatan, verifikasi informasi, abaikan narasi pemecah. *Frame* yang sederhana dan personal ini mudah direplikasi, dicampur, dan disisipkan ke konteks lokal oleh masyarakat, sehingga platform digital

berfungsi sebagai infrastruktur koordinasi yang meredam emosi-algoritmik yang bisa mendorong eskalasi menuju darurat sipil/militer.

Dengan demikian, keterlibatan Ferry Irwandi sebagai aktor intermediary menunjukkan kemampuan menghubungkan ruang personal dan ruang publik melalui jejaring digital. Namun demikian, efektivitas komunikasi tersebut tidak dapat dipahami secara linear. Bennett dan Segerberg melalui kerangka *connective action* menegaskan bahwa transmisi ekspresi personal melalui jaringan digital tidak selalu berkembang menjadi mobilisasi berskala besar, stabil, maupun mampu menghasilkan tindakan yang terarah (Bennett & Segerberg, 2012). Dalam kasus Ferry, sejumlah respons kontra menunjukkan bahwa narasi yang dibangun tidak selalu diterima secara lintas kelompok. Sebagian kelompok dengan orientasi politik berbeda memaknai konten yang disampaikan sebagai framing negatif, klaim yang problematis, atau narasi yang berpotensi memperkeruh situasi (Fajri, 2025).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pesan Ferry mampu menjangkau audiens luas dan mengalir secara organik di ruang digital, dayajangkaunya belum tentu merata pada seluruh spektrum masyarakat. Pesan tersebut cenderung lebih kuat beresonansi di kalangan publik yang sejak awal memiliki kedekatan pandangan, dibanding menembus kelompok dengan preferensi politik yang berbeda. Dengan kata lain, kekuatan Ferry sebagai intermediary digital terletak pada kapasitasnya mengonsolidasikan jaringan publik tertentu dan membangun tekanan wacana, tetapi tidak otomatis menjadikannya mediator universal yang diterima oleh semua kelompok sosial-politik.

C. Problematisasi Peran Ferry Irwandi sebagai Aktor *Intermediary* Digital

Dalam konteks ini, media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi arena pembentukan legitimasi politik, advokasi publik, dan mobilisasi sosial. Meskipun demikian, dalam dinamika demonstrasi Agustus–September, peran Ferry Irwandi sebagai aktor *intermediary* digital tidak selalu berjalan mulus atau tanpa hambatan. Justru melalui konteks inilah dapat dilihat bahwa praktik intermediasi digital kerap diwarnai oleh berbagai keterbatasan.

Dalam konteks demonstrasi Agustus–September, narasi yang disampaikan oleh Ferry Irwandi memang memperoleh respons kesepakatan yang luas, baik melalui interaksi di kolom komentar media sosial maupun melalui reproduksi konten oleh kreator lain yang mengaitkan narasinya. Dalam posisi tersebut, Ferry tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai simpul penting yang memediasi aliran wacana di ruang digital. Melalui kanal media sosial yang dimilikinya, Ferry memiliki keleluasaan dalam menentukan isu-isu yang diangkat ke ruang publik, seperti ketika ia secara personal menyerukan perhatian terkait isu darurat militer dan isu terhadap kasus demonstran yang dilaporkan hilang dalam rangkaian demonstrasi (Sulaiman, 2025; Zaman, 2025).

Namun, legitimasi publik yang terbentuk melalui mekanisme ini, meskipun memperkuat daya sebar pesan, juga berpotensi menyempitkan ruang diskusi deliberatif. Ketika proses intermediasi berlangsung dalam ekosistem media sosial yang ditopang oleh algoritma, penguatan terhadap narasi dominan menjadi lebih intens, sementara ruang bagi perspektif alternatif cenderung terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran *intermediary* yang terlegitimasi di dalam media sosial, meskipun efektif dalam mobilisasi, juga membawa implikasi terhadap kualitas diskusi deliberatif dalam aktivisme digital.

Selain persoalan struktur algoritmik, problematika lain terletak pada personalisasi figur dalam intermediasi digital. Penguatan legitimasi melalui narasi personal memang dapat mempercepat resonansi pesan, namun juga membawa kerentanan tersendiri. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu figur dapat membuat stabilitas jaringan ikut terdampak ketika kredibilitas figur tersebut melemah. Dengan kata lain, keberhasilan penyebaran pesan sangat bergantung pada kapasitas individu dalam menjaga kepercayaan publik untuk mempertahankan stabilitas gerakan (Bennett & Segerberg, 2012). Apabila figur tersebut melakukan kesalahan atau kehilangan legitimasi, maka daya tahan narasi gerakan juga dapat ikut melemah.

Di luar dinamika internal media sosial, keterbatasan berikutnya tampak dalam relasi antara tekanan digital dan logika institusional negara. Hal ini tercermin dalam upaya Ferry Irwandi menyoroti nasib ratusan hingga ribuan demonstran yang ditangkap selama rangkaian aksi Agustus–September. Melalui sejumlah unggahannya di platform Instagram dan *YouTube*, Ferry secara konsisten menyerukan pembebasan para demonstran yang masih ditahan, dan seruan tersebut memperoleh resonansi yang luas di kalangan publik digital. Meskipun demikian, secara faktual proses penegakan hukum tetap berjalan dengan logika institusionalnya sendiri. Hingga 27 September 2025, dari sekitar 3000 demonstran yang sempat ditangkap, aparat kepolisian masih mendakwa 959 orang (Amnesty International, 2025). Pola keterbatasan serupa juga terlihat dalam respons pemerintah terhadap tuntutan 17+8 yang berkembang dalam rangkaian demonstrasi. Meskipun sebagian tuntutan tersebut memperoleh respons positif dan dinyatakan dapat ditindaklanjuti, namun terdapat pula beberapa tuntutan yang masih perlu untuk dipertimbangkan atau ditunda (Gintings, 2025).

Respons yang bersifat selektif ini menunjukkan bahwa tekanan wacana yang dibangun di ruang publik termasuk yang dimediasi oleh aktor-aktor *intermediary* tidak serta-merta diterjemahkan secara utuh ke dalam keputusan kebijakan. Sebaliknya, negara cenderung melakukan penyaringan terhadap tuntutan yang dianggap kompatibel dengan kepentingan dan logika institusionalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Ferry sebagai aktor *intermediary* digital lebih efektif dalam membangun kesadaran dan tekanan simbolik di ruang publik, dibandingkan dalam memengaruhi secara langsung keputusan dan mekanisme formal aparat negara.

Di samping itu, meskipun Ferry Irwandi sering memanfaatkan ruang digital sebagai arena utama dalam menyampaikan pesan dan membangun narasi gerakan, Ferry Irwandi tidak sepenuhnya membatasi praktik aktivismenya pada ranah daring. Dalam beberapa momen selama demonstrasi Agustus–September, Ferry juga terlibat secara langsung di lapangan, baik untuk menyampaikan tuntutan, mengingatkan demonstran agar saling melindungi serta mewaspadai provokasi dan potensi kerusuhan, maupun mendesak aparat kepolisian untuk membebaskan massa aksi yang masih ditahan.

Praktik ini menunjukkan bahwa aktivisme digital dalam konteks gerakan sosial kontemporer belum sepenuhnya menggantikan aksi kolektif di ruang fisik. Sebaliknya, efektivitas gerakan justru dibentuk melalui kombinasi antara mobilisasi digital dan kehadiran langsung di lapangan. Hal ini dikarenakan ruang fisik dapat dibaca sebagai respons atas keterbatasan ruang digital itu sendiri, di mana kehadiran tubuh dan interaksi langsung masih dianggap perlu untuk membangun legitimasi moral dan tekanan politik yang lebih konkret.

KESIMPULAN

Analisis menggunakan teori *connective action* (Bennett & Segerberg, 2013) menunjukkan bahwa pola partisipasi yang dimunculkan oleh Ferry Irwandi bersifat individual, naratif, dan berbasis jaringan. Melalui konten-konten digital yang diproduksinya, Ferry mampu mengubah ekspresi personal menjadi kesadaran kolektif melalui tiga dimensi utama, yakni partisipasi berbasis preferensi personal, ekspresi politik melalui narasi personal, serta komunikasi yang tersebar dalam jaringan digital. Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bagaimana logika *connective action* bekerja dalam konteks aktivisme digital yang bertumpu pada personalisasi isu dan keterhubungan horizontal antar warga, tanpa ketergantungan pada struktur organisasi formal.

Namun demikian, temuan dalam tulisan ini juga menunjukkan bahwa peran Ferry Irwandi sebagai aktor *intermediary* digital tidak sepenuhnya berjalan secara mulus dan tanpa keterbatasan. Meskipun ia berhasil memperoleh legitimasi diskursif yang kuat melalui dukungan publik dan penyebaran narasi yang masif yang turut ditopang oleh mekanisme algoritmik media sosial proses tersebut juga berpotensi menyempitkan ruang diskusi deliberatif dengan menguatkan narasi dominan. Selain itu, legitimasi yang terbangun di ruang digital tidak secara otomatis terkonversi menjadi perubahan pada praktik institusional aparat negara, yang tetap bergerak berdasarkan logika dan kepentingan birokratisnya sendiri. Keterbatasan tersebut juga tercermin dari kenyataan

bahwa, meskipun beroperasi terutama di ruang digital, Ferry Irwandi tetap terlibat secara langsung dalam aksi-aksi di ruang fisik. Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme digital belum sepenuhnya menggantikan pentingnya kehadiran tubuh dan interaksi langsung dalam membangun legitimasi moral serta tekanan politik yang lebih konkret.

Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini berargumen bahwa transformasi aktor *intermediary* dari bentuk-bentuk formal menuju aktor yang lebih cair seperti konten kreator memang memerlukan perluasan jangkauan dan kecepatan penyebaran narasi politik. Namun, efektivitas tersebut memiliki batas, khususnya dalam mendorong perubahan keputusan di tingkat institusional. Oleh karena itu, aktor *intermediary* digital tidak sepenuhnya menggantikan peran *intermediary* formal, melainkan beroperasi dalam relasi yang saling melengkapi sekaligus tegang, di mana kekuatan simbolik dan diskursif di ruang publik belum selalu sejalan dengan logika pengambilan keputusan negara.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui yakni, berfokus pada studi kasus tunggal Ferry Irwandi membuat temuan ini belum dapat digeneralisasikan untuk menjelaskan fenomena aktivisme digital dan konten kreator politik di Indonesia secara lebih luas. Selain itu, analisis yang bertumpu pada konten publik di ruang digital belum cukup mampu dalam menangkap dinamika yang terjadi dibelakang layar, seperti negosiasi dan koordinasi informal yang tidak tampak dimuka publik. Dampak konkret aktivisme Ferry Irwandi terhadap perubahan kebijakan institusional juga belum terukur secara mendalam, mengingat relasi antara tekanan digital dan respons institusional bersifat sangat kompleks. Peran dari algoritma pada platform pun baru dibahas dalam tataran konseptual, belum dikaji secara teknis-empiris.

Atas dasar keterbatasan yang ada dimaksud, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi komparatif yang melibatkan beberapa aktor *intermediary* digital dari berbagai latar belakang isu, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan representatif. Integrasi metode wawancara mendalam dengan konten kreator, audiens, dan pejabat institusional juga diperlukan dalam memahami bagaimana tekanan digital diterjemahkan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, kajian khusus mengenai peran algoritma dalam membentuk visibilitas serta polarisasi narasi politik juga masih perlu dikembangkan, begitu pula eksplorasi mengenai keberlanjutan aktivisme berbasis konten kreator di tengah tekanan komersial dan risiko *deplatforming* yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amania, D. (2025). *Profil Ferry Irwandi: Istri, Pendidikan, Kekayaan, Fakta Menarik, Hingga Kumpulan Foto*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/Ferry-Irwandi>
- Amnesty International. (2025). *Indonesia: Police Beat Protesters And Unlawfully Used Tear Gas To Crush Protests – New Investigation*. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/12/indonesia-police-beat-protesters-and-unlawfully-used-tear-gas-to-crush-protests-new-investigation/>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic Of Connective Action: Digital Media And The Personalization Of Contentious Politics. *Information Communication And Society*, 15(5), 739–768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). The Logic Of Connective Action: Digital Media And The Personalization Of Contentious Politics. In M. Beissinger, J. A. Goldstone, M. Goldstone, D. Mcadam, S. A. Soule, S. Staggenborg, S. Tarrow, C. Tilly, E. J. Wood, & D. Yashar (Eds.), *Information, Communication & Society* (First Edit, Vol. 15, Number 5). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2012.670661>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis In Psychology. *Qualitative Research In Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Castells, M. (2013). *Communication Power* (2nd Ed.). OUP Oxford.
- Dalimunthe, M. A. (2018). Implikasi Internet Sebagai Media Interaktif Dalam Membangun Citra Aktor Politik. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan Islam*, 10. <https://doi.org/10.31332/Am.V10i2.810>

- Diani, M. (2003). Networks And Social Movements: A Research Programme. In M. Diani & D. Mcadam (Eds.), *Social Movements And Networks: Relational Approaches To Collective Action* (P. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199251789.003.0013>
- Eriyanto, E. (2020). Hashtags And Digital Movement Of Opinion Mobilization: A Social Network Analysis/SNA Study On #Bubarkankpai Vs #Kamibersamakpai Hashtags. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(3). <https://doi.org/10.7454/Jki.V8i3.11591>
- Fajri, D. A. (2025, September 12). *TNI Klaim Konten Ferry Irwandi Menyesatkan Dan Ganggu Stabilitas* |Tempo.Co. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/tni-klaim-konten-ferry-irwandi-menyestakan-dan-ganggu-stabilitas-2069027>
- Gintings, A. D. (2025). *Prabowo Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Sebagian Masuk Akal, Sebagian Perlu Dirundingkan*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-8100301/prabowo-soal-17-8-tuntutan-rakyat-sebagian-masuk-akal-sebagian-perlu-dirundingkan>
- Habermas, J. (1996). *Between Facts And Norms: Contributions To A Discourse Theory Of Law And Democracy* (2nd Ed.). Cambridge: The MIT Press.
- Haryanto, H., Hairini, S. M., & Bakar, A. (2013). PKBI : Aktor Intermediary Dan Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(3), 187–199. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v10i1.53985>.
- Irwandi, F. (2025). *Penjelasan Lengkap Rangkaian Aksi Demo Dan Solusi* [Video Recording]. Ferry Irwandi.
- Khotimah, N. (2025). *Ferry Irwandi Dulu PNS Di Mana? Pilih Resign, Kini Jadi Aktivis Yang Guncang Publik*. Suara.Com. <https://www.suara.com/lifestyle/2025/09/04/130747/ferry-irwandi-dulu-pns-di-mana-pilih-resign-kini-jadi-aktivis-yang-guncang-publik>
- Kozinets, R. V. (2020). *Netnography: The Essential Guide To Qualitative Social Media Research*. (3rd Ed.). SAGE.
- Landwehr, C., Saalfeld, T., & Schäfer, A. (Eds.). (2022). *Contested Representation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009267694>
- Migdal, J. S. (2001). *State In Society*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511613067>
- Nugraha, R. F. (2025). *Ferry Irwandi Soroti Tunjangan Pensiun DPR, Minta Dihapus Karena Jadi Beban Fiskal*. 1 September. <https://m.tribunnews.com/nasional/2025/09/01/ferry-irwandi-soroti-tunjangan-pensiun-dpr-minta-dihapus-karena-jadi-beban-fiskal?page=2>
- Onwuegbuchulam, S. P. C. (2021). *State-Civil Society Relations In Nigeria: A State-In-Society Approach Interrogation* (Pp. 31–44). https://doi.org/10.1007/978-3-030-73375-9_3
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept Of Representation* (First Pape). University Of California Press, Ltd.
- Pratama, E. R. (2025). *Affan Kurniawan Meninggal Dunia Dilindas Rantis Brimob, Ferry Irwandi: Mulut Sampah Sahroni Punya Andil Besar*. 29 Agustus. <https://www.aboutmalang.com/nasional/14215817606/affan-kurniawan-meninggal-dunia-dilindas-rantis-brimob-ferry-irwandi-mulut-sampah-sahroni-punya-andil-besar>
- Rahmatullah, A. F., & Jabbar, Y. M. (2023). Transformasi Exalt To Creativity (XTC): Gerakan Sosial Baru, Aktor Intermediary, Atau Politik Praktis? *Jurnal Polgov*, 5(1), 197–236. <https://doi.org/10.22146/Polgov.V5i1.6547>
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Janitra, P. A. (2020). Strategi Aktivisme Digital Di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas Dan Ekosistem Aktivisme. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4(2), 123. <https://doi.org/10.24198/Jmk.V4i2.26522>
- Saksono, H. (2020). Digital Pilkada: Have Local Elections (Pilkada) Been Affected By Digitalization? Attainment, Challenges, And Policy Solutions. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 287–299. <https://doi.org/10.21787/Jbp.12.2020.287-299>
- Stafford, T., Gordon, H., & Dommett, K. (2025). *Online Political Adverts : The Effect Of Disclosures And Opportunities For Clandestine Campaigning*. 46, 722–748. <https://doi.org/10.1111/Pops.13034>
- Sulaiman, M. R. (2025). *Ferry Irwandi Buka Suara: Lupakan Drama Dengan TNI, Fokus Selamatkan Ratusan Demontran*. Yoursay.Id. https://yoursay.suara.com/news/2025/09/15/092504/ferry-irwandi-buka-suara-lupakan-drama-dengan-tni-fokus-selamatkan-ratusan-demontran?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded
- Sumargo, D. (2025). *DEMO RUNTUHKAN DPR, PASHA UNGU MENJAWAB KENAPA DPR BERJOGET*. [Video Recording]. Denny Sumargo.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2021). *Contentious Politics* (Second). Oxford Univeristy Press.
- Tim Tvonenews.Com. (2025). *Profil Ferry Irwandi Sosok Lantang Demo Dpr Eks Pns Kemenkeu Yang Jadi Influencer Dan Aktivis Reformasi*. TV One.

- <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/368033-profil-ferry-irwandi-sosok-lantang-demo-dpr-eks-pns-kemenkeu-yang-jadi-influencer-dan-aktivis-reformasi?page=all>
- Törnquist, O. (2017). Power, Conflict And Democracy: The Analytical Framework. *PCD Journal*, 1(1–2), 13. <https://doi.org/10.22146/pcd.25673>
- Utomo, B. S., & Irwansyah, I. (2023). Peran Media Sosial Dalam Gerakan Menolak Penundaan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 108–128. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.10214>
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth Political Participation And Digital Movement In Indonesia: The Case Of #Reformasidikorupsi And #Tolakomnibuslaw. *F1000Research*, 12(May), 543. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research And Application : Design And Methods* (6th Editit). SAGE Publication, Inc.
- Yuliarti, M. S., Siagian, M., & Wardaningtyas, A. K. (2020). Network Society And Social Movement: Message Reception Among Instagram Users. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(2), 179–188. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v5i2.382>
- Zaman, S. (2025). *Narasi Darurat Militer: Membaca Polemik Ferry Irwandi Dan TNI*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/syahiduzzaman5860/68c6cf0834777c6fc512ed84/narasi-darurat-militer-membaca-polemik-ferry-irwandi-dan-tni?L=C>